

Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Pilihan Investasi Untuk Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

POINT PENTING:

- 1. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan pembangunan sektor pertanian merupakan sumber utama penyebab kemiskinan.**
- 2. Transformasi ekonomi menuju industrialisasi dan jasa tidak diikuti oleh transformasi sosial sehingga menjadi dilema dalam masalah kemiskinan di Indonesia.**
- 3. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian belum mampu mengatasi persoalan kemiskinan.**
- 4. Perlu adanya peningkatan kapasitas investasi masyarakat dalam strategi penanggulangan kemiskinan karena kontribusinya cukup besar dalam menurunkan angka kemiskinan di sektor pertanian.**



Transformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia telah memperkecil kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Saat ini, peranan sektor pertanian terhadap *Gross Domestic Product (GDP)* di Indonesia hanya sebesar 14%, jauh menurun dibandingkan pada dekade 1970-1990. Tapi penurunan ini tidak diikuti oleh transformasi sosial seperti ketenagakerjaan dan kemiskinan. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih bergantung pada sumber penghidupan pada sektor pertanian¹. Dan setengah dari jumlah penduduk miskin di Indonesia berada di sektor ini². Ini menjadi sangat ironi dalam model pembangunan bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia.

Kekhawatiran terhadap keberlanjutan kemiskinan akan semakin membesar bila kita dihadapkan dengan model pembangunan sektor pertanian di Indonesia seperti kondisi diatas. Dalam *growth economic theory*, kemiskinan dapat diturunkan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau diistilahkan *growth pro poor*.

Dimana pertumbuhan ekonomi yang baik mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Ketika sektor pertanian yang menjadi sumber kemiskinan mengalami pertumbuhan yang kecil dan kontribusi terhadap GDP rendah maka akan sulit mencari solusi dalam rangka penanggulangan kemiskinan³.

Salah satu yang mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian adalah meningkatkan kapasitas investasi baik yang bersifat investasi pemerintah (*government investment*) atau investasi swasta (*private investment*). Investasi akan mendorong peningkatan kapasitas produksi, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menjadi persoalan saat ini adalah kapasitas investasi pemerintah terhadap sektor pertanian belum mampu menciptakan nilai tambah bagi petani terutama kelompok petani kecil.

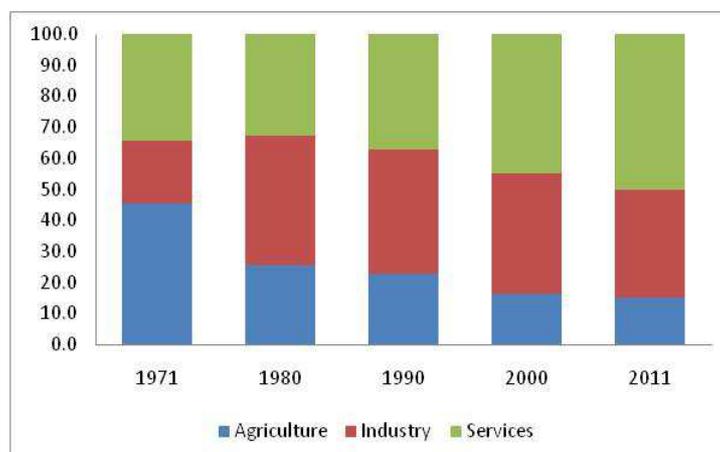
Sedangkan investasi swasta cenderung bersifat korporatisasi (*business oriented*) yang menciptakan kesenjangan dalam pembangunan sektor pertanian, sehingga efek investasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di sektor pertanian masih kecil.

Ini yang perlu bersama kita atasi dalam rangka strategi penanggulangan kemiskinan terutama di sektor pertanian. Perlu skema model investasi yang mampu secara langsung dan massif memperbaiki kemiskinan di Indonesia.

TRANSFORMASI EKONOMI DAN SEKTOR PERTANIAN YANG DIABAIKAN

Masa kejayaan sektor pertanian dalam pembangunan sudah berakhir. Transformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia telah merubah pola pembangunan ekonomi. Sektor industri dan jasa mendapatkan tempat yang besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini. Transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia pada dekade tahun 1980an berdampak terhadap perkembangan sektor industri dan jasa⁴. Penguatan sektor industri dan jasa menyebabkan peningkatan arus modal luar negeri yang banyak di serap oleh kedua sektor. Masuknya arus modal asing dalam skala besar dapat meningkatkan output produksi terutama terhadap barang-barang yang berorientasi ekspor. Peningkatan ekspor tersebutlah yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di Indonesia dan peranan industri dan jasa menjadi besar, penyokong utama kekuatan ekonomi Indonesia.

Gambar 1.
Kontribusi Sektor terhadap GDP di Indonesia, Tahun 1971-2011



Sumber: BPS berbagai tahun

Gambar 1. menunjukkan terjadinya penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap GDP di Indonesia. Pada tahun 1971, sektor pertanian menyumbangkan 46% terhadap GDP.

Selanjutnya, pada tahun 1980 mengalami penurunan yang cukup drastic, kontribusi sektor pertanian hanya sebesar 24%. Ini merupakan sebuah regulasi industrialisasi yang dilakukan oleh Soeharto yang mendorong peningkatan pembangunan sektor industri dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu. Seiring dengan menguatnya sektor industri dan jasa, tahun 2000, awal dari perbaikan ekonomi pasca *Asian Financial Crisis*, sektor pertanian hanya berkontribusi sebesar 14% dan semakin turun pada tahun 2011 menjadi 14%. Selama 1971-2011, terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian sebesar 32%. Inilah yang menjadi konsekuensi bagi transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia.

Transformasi ekonomi menjadi persoalan ketika tidak diikuti oleh perubahan struktur sosial masyarakat. Saat ini hampir 60% penduduk Indonesia masih berada di sektor pertanian. Sekitar 40,6% tenaga kerja di Indonesia masih bekerja di sektor pertanian. Dan yang dahsyatnya lagi, sekitar 57,8% penduduk miskin di Indonesia berada di sektor pertanian. Ini menjadi ironi bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Struktur agraris sebenarnya masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Begitu juga potensi sumber daya ekonomi masih besar peluang untuk mengembangkannya karena kondisi geografis yang cocok dengan pertanian. Penguatan sektor industri dan jasa memang perlu dilakukan karena merupakan arah dari globalisasi ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi memperkuat pondasi sektor pertanian juga sangat lah penting.

Melihat kasus di negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia dan berapa Negara Uni Eropa, kemajuan ekonomi mereka melalui melalui transformasi ke sektor industri dan jasa, tapi awal dari industrialisasi justru melalui penguatan sektor pertanian.

Negara-negara maju tidak semata memindahkan struktur ekonomi secara langsung ke industri padat modal dan teknologi tapi melakukan peningkatan nilai tambah pertanian melalui kebijakan industri.

Industri pertanian diperkuat dan diciptakan sebagai landasan dasar dari pengembangan sektor lain. Tapi model ini tidak dilakukan oleh Indonesia. Setelah sukses dalam swasembada pangan pada dekade 1980an, justru pemerintah melakukan industrialisasi terutama pada industri yang berorientasi ekspor. Walaupun saat itu, kondisi pangan nasional terjaga tapi dalam jangka panjang akan mengalami degradasi akibat dari kebijakan tersebut.

Kritikan terhadap kondisi ini sudah banyak dibahas tapi pemerintah melihat penguatan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak positif terhadap perbaikan sektor pertanian. Ternyata ini tidak terjadi, akibatnya dirasakan saat ini. Kondisi pertanian Indonesia sangat mengkhawatirkan. Kerawanan pangan terjadi dimana-mana akibat produksi tidak mampu lagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Keras liberalisasi juga menimbulkan efek terhadap sektor pertanian di Indonesia. Adanya ketimpangan antara permintaan dengan produksi memaksa pemerintah melakukan importisasi pangan secara massif⁵. Inilah resiko dari kebijakan transformasi ekonomi yang mengabaikan sektor pertanian.

PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN DAN KEMISKINAN

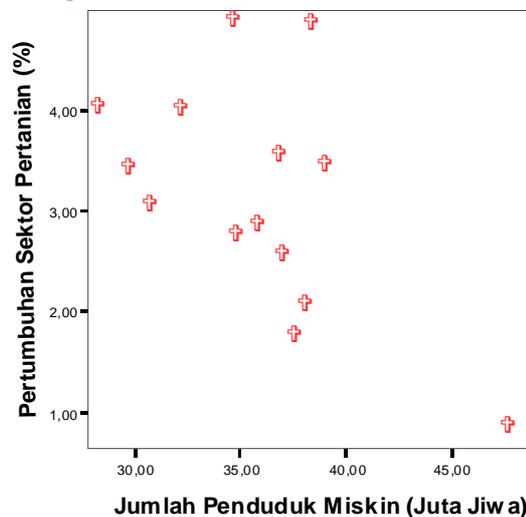
Beberapa studi menunjukkan, adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Logikanya sangat sederhana, pertumbuhan ekonomi yang baik akan menciptakan lapangan pekerjaan. Ketika lapangan pekerjaan terbuka maka akan mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sehingga kemiskinan dapat dikurangi⁶. Bagi negara dengan struktur agraris dan beberapa negara berkembang, peranan pertumbuhan sektor pertanian sangat besar dalam menurunkan angka kemiskinan⁷.

Di Indonesia kasusnya sangat menarik. Ada hubungan pengaruh pertumbuhan sektor pertanian terhadap pengurangan penduduk miskin.

Semakin besar pertumbuhan sektor pertanian semakin menurun jumlah penduduk miskin. Ini dapat menjadi isu bahwa penguatan sektor pertanian dengan meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dapat menjadi strategi dalam penanggulangan kemiskinan.

Ironi, ketika pemerintah justru mengabaikan pembangunan sektor pertanian dan tidak memacu peningkatan pertumbuhan sektor pertanian. Selama tahun 2000-2012, rata-rata pertumbuhan sektor pertanian hanya sebesar 3,1% pertahun jauh dibawah rata-rata pertumbuhan GDP yang rata-rata sebesar 5-5.5% pertahun.

Gambar 2
Scatter Plot antara Pertumbuhan Sektor Pertanian dengan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia



Sumber: BPS (diolah)

Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian berimplikasi terhadap masih belum optimalnya penurunan jumlah penduduk miskin. Saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,6 juta jiwa dengan kondisi kemiskinan yang *absolute*. Jumlah penduduk yang rentan terhadap kemiskinan juga sangat besar. Penduduk miskin dan penduduk yang rentan terhadap kemiskinan

banyak berada di pedesaan dengan struktur ekonomi pada sektor pertanian. Adanya gejolak harga pangan di Indonesia memberikan efek yang besar terhadap kemiskinan karena model pendekatan kemiskinan yang menggunakan *basic need*, menempatkan konsumsi pangan terutama beras menjadi indikator utama kemiskinan di Indonesia⁸.

Ketika ada *excess demand* maka akan menekan jumlah penduduk miskin karena ketidakmampuan mereka terhadap kebutuhan pokok. Menjaga stabilitas harga pangan merupakan hal terpenting yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi pada prakteknya keseimbangan pasar terhadap pangan justru dilakukan melalui kebijakan impor. Ini menjadi paradox dalam pembangunan sektor pertanian dan menekan pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia.

RENDAHNYA KESEJAHTERAAN PETANI

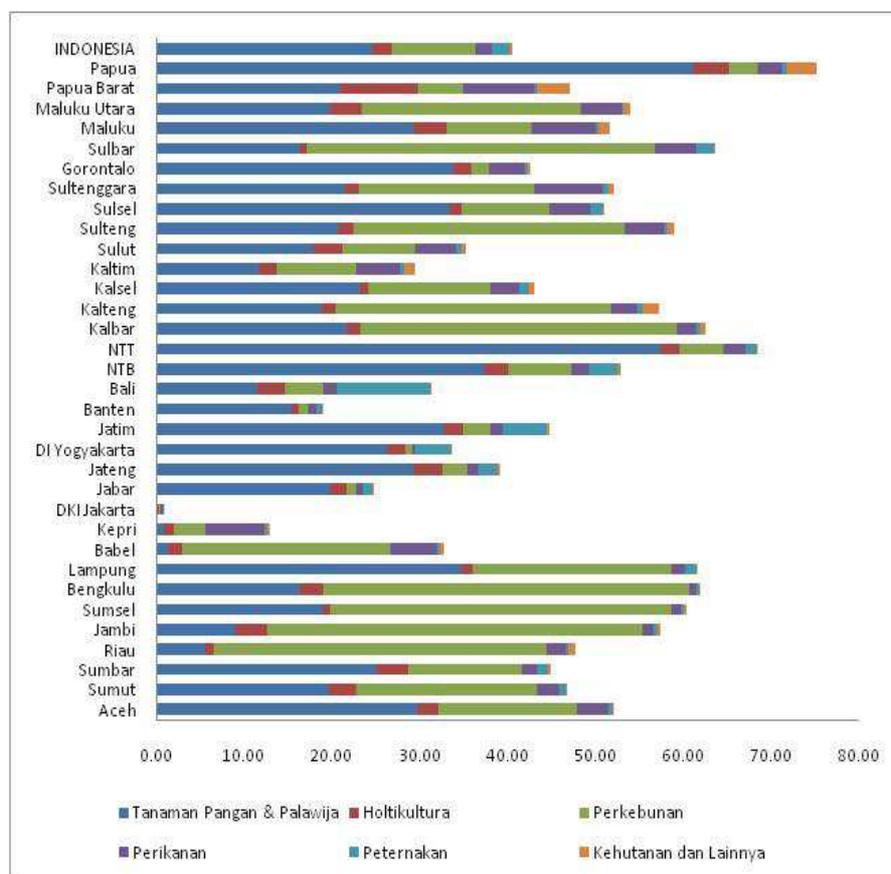
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa masih banyak tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Gambar 3 menunjukkan sekitar 40,6% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Dari jumlah tersebut 24,7% bekerja di sub sektor tanaman pangan dan palawija, 9,4% sub sektor perkebunan,

2,2% di sub sektor hortikultura, 2% pada sub sektor peternakan, 1,9% pada sub sektor perikanan dan 0,4% pada sub sektor kehutanan dan pertanian lainnya.

Dari aspek spasial ada variasi distribusi tenaga kerja menurut sub sektor. Di Sumatera terutama Riau, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung lebih di dominasi oleh sub sektor perkebunan.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kalimantan. Di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Papua, tenaga kerja sektor pertanian lebih banyak berada di sub sektor tanaman pangan dan palawija. Sedangkan di Sulawesi lebih seimbang antara sub sektor tanaman pangan dan palawija dengan sub sektor perkebunan.

Gambar 3
Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja di Sektor Pertanian di Indonesia



Sumber: diolah dari Sensus Penduduk (2010)

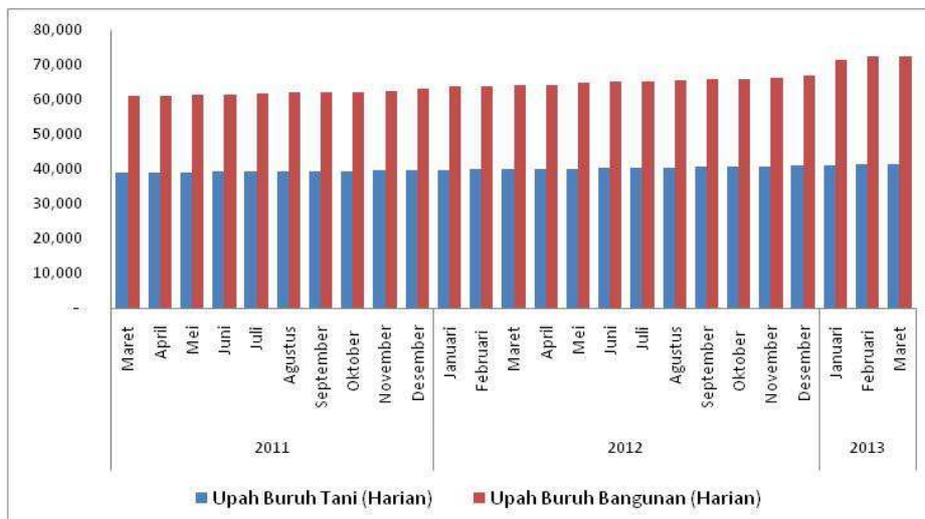
Variasi tenaga kerja ini juga menjadi pembelajaran dalam rangka strategi penanggulangan kemiskinan di sektor pertanian. Pemerintah tidak boleh melakukan generalisasi program kemiskinan karena dari aspek karakteristik pekerjaan sudah berbeda. Maka program kemiskinan di sektor pertanian harus memperhatikan karakteristik dari masing-masing kemiskinan tersebut. Munculnya kemiskinan yang besar di sektor pertanian di Indonesia disebabkan tidak meratanya akses petani terhadap faktor produksi terutama lahan dan modal. Bila dilihat dari kondisi tenaga kerja di sektor pertanian, rata-rata merupakan buruh tani dan petani gurem yang rata-rata hanya memiliki lahan 0.5 hektar. Inilah yang menjadi implikasi utama rendahnya produktivitas petani di Indonesia yang menyebabkan munculnya kantong-kantong kemiskinan di sektor pertanian.

Gambar 4 menunjukkan bagaimana perbedaan yang besar upah nominal antara buruh tani dengan buruh bangunan. Ini menjadi persoalan krusial dalam rangka penanggulangan kemiskinan di sektor pertanian di Indonesia. Rata-rata upah buruh tani di Indonesia sebesar Rp. 40.000- Rp. 41.400 per hari dua pertiga dari upah buruh bangunan. Bila kita bicara upah riil (upah nominal dibagi indeks harga konsumen) maka akan terjadi penurunan yang cukup besar.

Bila satu rumah tangga tani memiliki empat orang anggota keluarga maka pendapatan perkapita rumah tangga buruh tani hanya sebesar Rp. 10.000/kapita. Coba bayangkan ketika jumlah keluarga lebih dari empat orang. Maka sangatlah logis sektor pertanian menyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia.

Gambar 4

Perbedaan Upah Nominal Buruh Tani dengan Buruh Bangunan (Rp/hari)



Sumber: BPS (diolah)

PILIHAN INVESTASI DALAM STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Salah satu komponen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pengeluaran pembangunan dan bisa juga melalui investasi oleh masyarakat (swasta).

Investasi pemerintah lebih di dorong pada penguatan fungsi pelayanan public atau *public services* sedangkan investasi swasta lebih pada penguatan nilai tambah ekonomi yang bersifat *business oriented*.

Pada bagian lain investasi pemerintah dapat juga berperan sebagai stimulus terhadap investasi swasta bisa dalam bentuk penyediaan infrastruktur. Pada prinsipnya investasi akan mendorong perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Ini akan bisa mendorong kesejahteraan dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Analisis pada bagian ini, kita coba melihat pengaruh investasi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

- **Investasi Pemerintah Sektor Pertanian**

Dalam menganalisis investasi pemerintah sektor pertanian digunakan pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian dalam APBN. Gambar 5 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Bagi kita ini logis terjadi karena sistem politik anggaran di Indonesia terutama sektor pertanian masih belum pro kemiskinan.

Kebanyakan pengeluaran pemerintah dialokasi untuk biaya rutin sedangkan pengeluaran untuk pembangunan relatif kecil. Padahal pengeluaran untuk pembangunan inilah yang memiliki peran dalam mengatasi kemiskinan. Seharusnya pemerintah memperbesar alokasi pengeluaran pembangunan di sektor pertanian. Alokasinya pun harus digunakan pada program-program pro kemiskinan seperti irigasi, penyediaan pupuk, subsidi terhadap suku bunga kredit, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan pengembangan inovasi terhadap produk pertanian.

Gambar 5
Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian dengan
Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, 2000-2012



Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS (diolah)

- **Investasi Masyarakat (Swasta)**

Alat ukur dari investasi masyarakat digunakan realisasi dari penanaman modal baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi masyarakat atau pembentukan modal bruto dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup signifikan selain konsumsi. Dari aspek tersebut bisa membuktikan bahwa investasi masyarakat akan bisa menjadi instrumen dalam penurunan angka kemiskinan.

Gambar 6 dan gambar 7 menunjukkan pengaruh dari PMDN dan PMA terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Ada kecenderungan akselerasi PMDN dan PMA memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Artinya, semakin besar realisasi PMDN dan PMA semakin banyak penduduk yang keluar dari garis kemiskinan. Pemerintah perlu mendorong terjadinya peningkatan PMDN dan PMA terutama di sektor pertanian agar memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Paradigma berpikir bahwa masalah kemiskinan hanya menjadi beban pemerintah perlu diperbaiki. Pelaku usaha atau masyarakat secara umum juga harus memberikan kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan. Dengan meningkatkan daya saing investasi dan memperbaiki tata kelola birokrasi dalam perizinan usaha yang akan mendorong penanaman modal merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya memperbesar kapasitas ekonomi yang nantinya akan di dorong dalam perbaikan kemiskinan. Salah satu yang sukses dilakukan adalah investasi di sektor perkebunan seperti kelapa sawit, terlepas dengan isu kontroversial soal lingkungan yang sering mewarnai.

Perkembangan industri kelapa sawit yang cukup signifikan terutama di pedesaan dan kantong-kantong kemiskinan, ternyata mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut⁹. Model pengembangan komoditas investasi pertanian (tidak terbatas hanya pada kelapa sawit, bisa saja karet, kakao, kopi, teh, sengon, dan lainnya) yang melibatkan swasta dan partisipasi masyarakat setempat, akan sangat membantu menanggulangi kemiskinan.

Gambar 6
Hubungan antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, 2000-2012



Sumber: BKPM dan BPS (diolah)

Gambar 7

**Hubungan antara Penanaman Modal Asing (PMA) dengan
Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, 2000-2012**



Sumber: BKPM dan BPS (diolah)

Realisasi investasi swasta di sektor pertanian mengalami peningkatan dari tahun 2011-2012. Pada tahun 2011, jumlah PMDN sebesar Rp. 9.627 miliar dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 261 miliar atau naik sebesar 2,7%. Sebagian besar PMDN berada di sub sektor tanaman pangan dan perkebunan. Hal yang sama juga terjadi di PMA.

Sepanjang tahun 2011-2012, realisasi PMA mengalami kenaikan sebesar USD. 414 juta atau sebesar 32,7%. Kebanyakan PMA berada di sub sektor tanaman pangan dan perkebunan. Perbaikan infrastruktur terutama di sentra-sentra pertanian di Indonesia dapat menjadi upaya dalam peningkatan realisasi PMDN dan PMA.

Faktor infrastruktur inilah yang menjadi kendala utama bagi investor untuk masuk berinvestasi di sektor pertanian. Sister cluster industri pertanian yang menjadi rencana strategis pemerintah harus segera direalisasikan agar nilai tambah sektor pertanian menjadi lebih tinggi. Program kemitraan antara pelaku usaha besar dengan kecil seperti yang dilakukan di perkebunan kelapa sawit perlu ditingkatkan dengan sistem pengawasan yang ketat oleh pemerintah. Karena upaya pengentasan kemiskinan di beberapa daerah melalui program kemitraan cukup berhasil.

Tabel 1

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Sektor Pertanian, Tahun 2011-2012

Sub Sektor	2011				2012			
	PMDN		PMA		PMDN		PMA	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Tanaman Pangan & Perkebunan	255	9,367.3	264	1,222.5	180	9,631.5	261	1,601.9
Peternakan	62	247.2	14	21.1	31	97.4	14	19.8
Kehutanan	11	12.5	15	10.3	9	144.5	16	26.9
Perikanan	5	0.1	29	10.0	7	14.7	31	29.0
Total	333	9,627.1	322	1,263.9	227	9,888.2	322	1,677.6

Keterangan: P = Jumlah Proyek / Total of Project

I = Nilai Investasi dalam Rp. Miliar (PMDN) dan USD. Juta (PMA)

REKOMENDASI

Dalam konteks menciptakan pertumbuhan sektor pertanian dan strategi investasi dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia diperlukan kebijakan sebagai berikut:

A. Menata kembali strategi pembangunan sektor pertanian

Selama dua dekade ini, arah pembangunan sektor pertanian di Indonesia tidak jelas. Padahal perannya terhadap ekonomi masyarakat sangat tinggi. Walaupun transformasi ekonomi telah menuju ke industrialisasi dan orientasi jasa, tapi pemerintah harus mampu memperkuat pondasi ekonomi nasional dengan menempatkan pembangunan sektor pertanian sebagai sistem ketahanan ekonomi di Indonesia. Lini pertama yang perlu diperbaiki adalah kebijakan memperkuat sistem ketahanan pangan nasional.

Ini sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan sampai *access demand* diatasi dengan melakukan importisasi pangan karena sangat berbahaya bagi sistem ketahanan pangan nasional.

Lini kedua adalah menciptakan daya saing untuk industri pertanian. Tanpa daya saing yang kuat maka investasi akan sulit di dapatkan. Lini ketiga, hilirisasi terhadap produk perkebunan misalnya kelapa sawit. Kontribusi yang besar dari kelapa sawit terhadap perekonomian perlu ditingkatkan, hingga pengolahan dan pengembangan berbagai produk derivatifnya. Selama ini dibanding Malaysia, nilai tambah produk kelapa sawit Indonesia jauh lebih rendah. Untuk itu pemerintah perlu mendorong perbaikan di sektor hilir. Kelapa sawit adalah salah satu contoh, hilirisasi komoditas lain misalnya kakao, karet, kopi, dan lainnya juga perlu dilakukan dengan target waktu tertentu.

B. Pengeluaran pemerintah di sektor pertanian harus di dorong dalam upaya penurunan kemiskinan dan perbaikan daya saing sektor pertanian

Alokasi anggaran pemerintah terhadap sektor pertanian perlu ditingkatkan terutama anggaran untuk pembangunan. Selama ini komposisi anggaran rutin dalam anggaran pertanian sangat besar. Pemerintah harus memiliki kebijakan politik anggaran yang sehat dengan menurunkan besaran anggaran rutin. Untuk anggaran pembangunan sektor pertanian harus diarahkan untuk memperbaiki program-program penanggulangan kemiskinan. Salah satu yang menjadi kendala bagi masyarakat miskin di sektor pertanian adalah masalah lahan dan modal. Pemerintah harus berupaya untuk memperbaiki tata kelola lahan agar tidak terjadi ketimpangan dalam penguasaan lahan pertanian. Untuk permodalan, ternyata Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian realtif kecil dibanding sektor perdagangan. Ini menjadi persoalan, karena perbankan justru sangat selektif bagi petani. Perlu regulasi pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah realisasi KUR untuk petani. Ini sangat penting dilakukan agar para petani miskin mampu meningkatkan kesejahteraannya dan keluar dari kemiskinan.

C. Mendorong peningkatan investasi masyarakat (swasta) dalam upaya strategi penanggulangan kemiskinan

Investasi swasta ternyata sangat efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu perlu upaya dalam meningkatkan daya saing investasi di sektor pertanian agar mampu menarik investor menanamkan modalnya di sektor pertanian. Program kemitraan strategis antara pelaku usaha besar dengan petani kecil merupakan sasaran utama dalam menciptakan strategi penanggulangan kemiskinan.

Untuk itu pemerintah harus memperkuat regulasi terhadap program kemitraan. Harus ada insentif fiskal bagi pelaku usaha besar yang memiliki program kemitraan yang baik.

D. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Sektor Pertanian harus berbasis pada Karakteristik Masyarakat Petani.

Ada perbedaan struktur kemiskinan dan struktur pertanian antar wilayah di Indonesia. Bila dilihat dari kuantitas masyarakat miskin, paling besar berada di Pulau Jawa yaitu Jawa Timur (4,9 juta), Jawa Tengah (4,8 juta) dan Jawa Barat (4,4 juta). Struktur petani di tiga propinsi ini bergerak di sub sektor tanaman pangan dan palawija. Investasi sebagai strategi penanggulangan kemiskinan haruslah berbasis pada sub sektor tanaman pangan dan palawija. Karakteristik kemiskinan pada wilayah ini adalah buruh tani dan petani gurem dengan penguasaan lahan sekitar 0,5 hektar. Kondisi petani miskin di daerah ini adalah kesulitan terhadap akses modal dan lahan sehingga pendapatan yang diterima tidak sebanding dengan pengeluaran. Untuk memutus mata rantai kemiskinan maka investasi harus intensif untuk memperbaiki nilai tambah bagi petani yang bergerak pada tanaman pangan dan palawija.

Kemiskinan di sektor pertanian yang paling kronis dan besar angkanya berada di NTB, NTT, Papua dan Papua Barat. Karakteristik petani disini sangat rentan terhadap gejolak ekonomi nasional. Sistem pertanian bersifat tradisional dengan mengandalkan kondisi alam. Pemerintah harus berupaya untuk mendorong perbaikan infrastruktur pertanian di empat daerah tersebut. Peningkatan pengetahuan terhadap pola pertanian modern bisa dikembangkan melalui program penyuluhan pertanian yang intensif.

Selain itu, besarnya potensi yang ada di empat daerah ini terutama masih besarnya lahan pertanian yang belum dioptimalkan menjadi nilai tambah untuk mendorong investasi baik swasta dan pemerintah di ke empat daerah tersebut. Dua aspek inilah yang menjadi fokus utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan di sektor pertanian di Indonesia.

Policy brief ini ditulis oleh **Setyo Budiantoro, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa** dan **Wiko Saputra, Economic Policy Officer Perkumpulan Prakarsa.**

Kantor Prakarsa: Jl. Rawa Bambu 1 Blok A No.8E Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520. Telpn (021)7811798.

Endnotes

¹ Alisjahbana, Armida S. & Chris Manning. 2006. *Labour Market Dimensions of Poverty in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 42 (2): 235-261.

² Janvry, Alain de & Elisabeth Sadoulet. 2009. *Agriculture Growth and Poverty Reduction: Additional Evidence*. *World Bank Research Observer* 9 (25): 1-20.

³ Agrawal, Nisha. 1996. *The Benefits of Growth for Indonesia Workers*. Country Department III, East Asia and Pacific Region, The World Bank, paper presented at the Workshop on Economic Reform and Labour Market Restructuring for Indonesia. Jakarta. Dollar, David & Aart Kray. 2002. *Growth is Good for the Poor*. *Journal of Economic Growth* (7): 195-225.

⁴ Hill, Hal, Resosudarmo, P., Budy & Yogi Vidyattama. 2008. *Indonesia's Changing Economic Geography*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 44(3).

⁵ Rosner, L., Peter & Neil McCulloch. 2008. *A Note on Rice Production, Consumption and Import Data in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 44(1): 81-92. Simatupang, Pantjar & C Peter Timmer. 2008. *Indonesian Rice Production: Policies and Realities*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 44(1): 81-92.

⁶ Loayza, Norman V & Claudio Raddatz. 2010. *The Composition of Growth Matters for Poverty Alleviation*. *Journal of Development Economics* 93(1): 137-151. Balisacan, A.M., E.M. Pernia, and A. Asra (2007), 'Revisiting Growth and Poverty Reduction in Indonesia: What do Subnational Data Show?' *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39 (3), pp. 329-351.

⁷ Cervantes Godoy, Dalila & Joe Dewbre. 2010. *Economic Importance of Agriculture for Poverty Reduction*. *OECD Food Food Agriculture and Fisheries Working Paper No. 23*, Paris: OECD.

⁸ McCulloch, Neil. 2008. *Rice Price and Poverty in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 44(1): 45-64

⁹ Sungkar, Irfan & Wiko Saputra (2011). *Outlook of the Indonesian Palm Oil Industry*. Working Paper, Malaysian Palm Oil Council (MPOC): Kuala Lumpur.